



**ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI PERAN BANDARA
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar
Magister Ilmu Ekonomi

OLEH: Meylia Maharani

NIM. 160820201012

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu Kabupaten yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam kesuksesannya mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Kabupaten Banyuwangi juga mengembangkan sektor pariwisata. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan memanfaatkan potensi alam dan keanekaragaman budaya sebagai bagian pokok dari aset penjualan pariwisata. Kondisi geografis menjadikan Banyuwangi memiliki destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi mulai wisata alam, wisata religi, wisata kota, agrowisata, wisata buatan dan kuliner. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menerapkan konsep merek kota yang cukup berhasil untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan berbagai langkah dan strategi yang cerdas dengan melaksanakan berbagai event dan festival baik yang berskala lokal maupun internasional dengan konsep *sport*, *culture*, dan *touris* (Sadi, 2019).

Kabupaten Banyuwangi juga mengalami perkembangan pada sektor pariwisata dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasilnya dapat terlihat dari Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Perkembangan Wisata di Kabupaten Banyuwangi Periode 2012-2016

Tahun	Perkembangan Wisata	
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Kontribusi terhadap Total PDRB (%)
2012	13,53	24,60
2013	13,74	25,22
2014	14,17	26,10
2015	13,86	26,96
2016	14,05	28,11
2017	14,50	28,32
2018	15,21	29,11
2019	16,08	29,10

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2019, diolah

Tabel 1.1 menggambarkan peran pariwisata dari sisi kelembagaan unit usaha dan perusahaan yang usahanya mendukung kegiatan wisata, baik wisatawan asing

maupun domestik. Sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan dalam usaha ini adalah kontribusi pendapatan dari usaha kepariwisataan dalam PDRB yang dalam hal ini diwakili oleh subsektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Laju PDRB dari tahun 2012 sebesar 13,53% meningkat terus sampai tahun 2019 sebesar 16,08%. Hal itu menunjukkan bahwa laju PDRB di sektor pariwisata meningkat sebesar 13,53% sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Sedangkan kontribusi PDRB pariwisata terhadap total PDRB sebesar 24,60% tahun 2012 meningkat menjadi 29,0% tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor pariwisata dalam perekonomian Kabupaten Banyuwangi (BPS, Kabupaten Banyuwang, 2019).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah penciptaan *inklusivitas* pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang *inklusif*, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pariwisata. UMKM didesain sebagai pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran (RPJMD,2016).

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata yang demikian pesat perkembangannya, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan konsep pengembangan pariwisata yang terbagi menjadi beberapa aspek dengan ringkasan sebagai berikut: (1) Aspek Kewilayahan, melalui penentuan Kawasan Strategis Pariwisata; (2) Aspek Pengembangan Destinasi Wisata, melalui berbagai metode seperti penentuan skala pengembangan dan jaringan fungsional, peningkatan keberagaman daya tarik wisata, dan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan di daya tarik wisata; (3) Aspek Pengembangan Industri Pariwisata, yang dilakukan melalui: pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; (4) Aspek Pengembangan

Kelembagaan, dengan mengusahakan melakukan pembentukan Forum Pariwisata Banyuwangi, dan mendorong adanya dukungan teknis untuk memperkuat manajemen Badan Layanan Umum Daerah; (4) Aspek Pemasaran Pariwisata, dilakukan melalui pengembangan berbagai mekanisme pemberian manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek-aspek kepariwisataan, serta peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata (Bappeda, 2018).

Transportasi merupakan salah satu komponen dalam upaya pembangunan suatu wilayah. Transportasi menjadi sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya). Hal tersebut karena sektor-sektor lain membutuhkan jasa transportasi untuk mengangkut barang (bahan baku dan hasil produksi) dan manusia (petani, pedagang, karyawan, guru, murid, dokter, wisatawan, dan lainnya) dari tempat asal ke tempat tujuan. Oleh karena itu pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi terus menerus dilakukan untuk mencapai pembangunan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih baik (Budiman, 2000:15).

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga menjadikan sektor transportasi sangat penting dalam upaya pembangunan wilayah di Indonesia, terutama transportasi laut dan udara yang akan menjadi penghubung antar pulau dan daerah. Oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu diperhatikan secara cermat oleh pemerintah, civitas akademika, maupun masyarakat secara luas. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak dapat terlaksana apabila faktor-faktor pendukung baik secara fisik maupun sosial di suatu wilayah pembangunan belum memenuhi syarat. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Budiman, 2000:1). Tujuan pembangunan pada umumnya antara lain untuk mencapai kenaikan (pertumbuhan) pendapatan perkapita secara tepat, menyediakan kesempatan kerja yang cukup, mengusahakan pembagian pendapatan yang lebih merata, mengurangi

kesenjangan dalam tingkat pertumbuhan antar daerah, dan merubah struktur perekonomian menjadi lebih seimbang.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat sekitar Bandara Belimbing Sari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Setiap pembangunan pastinya menghasilkan dampak, yakni suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas, yang bersifat alamiah (Soemarwoto, 2001). Dalam konteks penelitian ini, pembangunan bandara adalah sebuah aktivitas yang memaksa terjadinya beberapa perubahan yang signifikan dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak yang terjadi meliputi semua aspek wilayah, baik yang bersifat lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan bisa berupa dampak yang positif maupun dampak negatif, yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pembangunan bandara memberi dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat ke depannya, baik secara positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan ganti rugi lahan, tidak mudah bagi mereka untuk mencari lahan pertanian dan perkebunan pengganti di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mengingat mayoritas warga desa sekitar adalah bermata pencaharian sebagai petani. Meski begitu, keberadaan bandara ini bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar jika mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, namun harus didukung dengan adanya modal dana yang memadai, misalnya untuk membuat usaha ekonomi. Pembangunan bandara ini juga memberi dampak secara sosial sehingga tatanan kehidupan masyarakat bisa berubah seiring dengan perkembangan wilayah menjadi lebih padat, ramai, dan semakin maju.

Pada awal berdirinya bandara ini diberi nama Bandara Blimbingsari. Pada tahun 2012 Bupati Banyuwangi mengundang arsitektur nasional salah satunya Andramatin untuk mendesain Terminal Bandara Blimbingsari yang baru. Hal ini dilakukan seiring dengan target Menteri Perhubungan bahwa Bandara Blimbingsari termasuk dalam 8 Bandara yang dikembangkan dimana outputnya dapat segera didarati pesawat jenis Boeing 737. Pada desain terminal baru Bupati Banyuwangi menginginkan konsep *green building* pada Bandara Blimbingsari. *Green Airport* Bandara Blimbingsari memiliki 6 kriteria yaitu tepat guna lahan,

efisiensi energi listrik dan cahaya, konservasi air, kenyamanan udara, siklus material, dan manajemen lingkungan. Penyelesaian perencanaan desain Terminal Bandara Blimbingsari dilakukan tahun 2013 dengan mengadopsi bentuk penutup kepala pria suku Osing (udeng) sebagai desain atap. Di bagian atap terdapat taman dengan konsep *roof garden* yang ditanami rumput dan tanaman lokal. Minimnya penggunaan perangkat pendingin udara dengan desain interior gedung terminal dirancang sedikit sekat sedangkan dinding berupa kisi-kisi yang membuat sirkulasi udara berjalan lancar dan sinar matahari dapat leluasa masuk sehingga mengurangi penggunaan lampu. Empat kolam ikan di lantai dasar juga berperan kuat pada pengendalian suhu di dalam ruangan terminal bandara.

Di awal tahun 2018 pengelolaan Bandara Internasional Banyuwangi tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tapi telah dilakukan kerjasama pengelolaan Bandara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Angkasapura II. Saat ini terdapat 8 (delapan) kali penerbangan dalam sehari dengan rute sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Penerbangan di Bandara Internasional Banyuwangi

No	Rute	Pesawat	Waktu Keberangkatan (Banyuwangi)
1	Jakarta – Banyuwangi - Jakarta	Garuda Indonesia	12.40 WIB
2	Jakarta – Banyuwangi - Jakarta	NAM Air	08.15 WIB
3	Jakarta – Banyuwangi - Jakarta	NAM Air	16.50 WIB
4	Jakarta – Banyuwangi - Jakarta	Citylink	09.15 WIB
5	Jakarta – Banyuwangi - Jakarta	Citylink	15.45 WIB
6	Surabaya – Banyuwangi - Surabaya	Garuda Indonesia	07.30 WIB
7	Surabaya – Banyuwangi - Surabaya	Garuda Indonesia	13.15 WIB
8	Surabaya – Banyuwangi - Surabaya	Wings Air	13.15 WIB

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2018

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Bandara Internasional Banyuwangi dapat dikatakan cukup pesat, sehingga target pendaratan Boeing 737 oleh Menteri Perhubungan dapat terlaksana. Target selanjutnya yang direncanakan

oleh pengelola Bandara Internasional Banyuwangi saat ini adalah Penerbangan Internasional. Hal ini seiring dengan strategi Kabupaten Banyuwangi, peningkatan ekonomi berbasis pariwisata. Dengan dibukanya jalur internasional tentunya akan memudahkan akses bagi wisatawan mancanegara untuk datang dan menjadi wisatawan di Banyuwangi.

Adanya pembangunan bandara akan secara langsung membawa dampak bagi masyarakat sekitar bandara. Penumpang dari pesawat udara akan memulai dan mengakhiri penerbangannya di bandar udara. Pengunjung yang bukan penumpang pesawat udara juga akan ikut turut meramaikan adanya bandara. Oleh karena itu, adanya fasilitas pelayanan yang ada di bandara akan sangat dibutuhkan bagi pengunjung maupun penumpang pesawat udara. Fasilitas tersebut dapat berupa ruang tunggu, kendaraan angkutan darat, restoran, hotel, rumah makan, tempat parkir, pertokoan, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan barang dan jasa. Selain itu menurut Nasution (2004) menyebutkan bahwa dengan adanya bandara di suatu wilayah maka akan terbentuk unit pelayanan yang lengkap dengan lingkup kegiatan yang meluas.

Dampak yang paling terlihat dari adanya bandara baru di suatu wilayah ialah beralihnya unit kegiatan usaha serta berubahnya penggunaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan bandara yang sebagian besar petani beranggapan bahwa apabila pembangunan bandara terlaksana maka mata pencaharian mereka akan hilang. Di sisi lain ada juga masyarakat yang mendukung pembangunan bandara baru tersebut. Masyarakat yang setuju akan dibangunnya bandara beranggapan bahwa dengan adanya bandara maka kegiatan perekonomian akan tumbuh dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat (Sabandar, 2014).

Adanya pembangunan transportasi bandara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baik itu di dalam wilayahnya maupun di wilayah sekitarnya (Nasution, 2004). Dengan dibangunnya bandara, maka muncul pusat pertumbuhan baru yang memberikan dampak bagi wilayah sekitarnya. Seiring dengan semakin bertambahnya pengunjung dan penumpang bandara, maka fasilitas pelayanan yang ada di sekitar bandara akan dibutuhkan, sehingga adanya bandara akan

menumbuhkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini diangkat dengan judul “**Analisis Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Peran Bandara di Kabupaten Banyuwangi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Bandara Internasional Banyuwangi terhadap peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?
- b. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan peran Bandara di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian adalah :

- a. Mengetahui peran Bandara Internasional Banyuwangi terhadap peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan peran Bandara di Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara ilmiah tentang peran pembangunan bandara terhadap peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Diharapkan konsep berpikir dan hasil-hasil yang didapat dari penelitian ini dapat menambah referensi dan membuka wacana penelitian selanjutnya;

- c. Penelitian ini bisa memberikan masukan terhadap pengembangan Bandara dan memberikan saran untuk membenahi rumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan di Banyuwangi pada masa mendatang.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith membagi pertumbuhan menjadi 5 tahapan mulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam teori ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi, pembagian kerja merupakan pembahasan utama teori ini dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor pendorong yaitu: (1) peningkatan keterampilan kerja, dan (2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi ini akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalis. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat (Subandi: 2014).

Semua tahap pembangunan tersebut tidak lepas dari kondisi dasar, yaitu bahwa pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan sempurna yang mempunyai karakteristik: (1) ada banyak penjual dan pembeli di pasar; (2) produk yang diperjual belikan bersifat homogen; (3) tidak ada kolusi antara penjual dan pembeli; (4) semua sumber daya memiliki mobilitas sempurna; (5) pembeli dan penjual memiliki informasi sempurna mengenai kondisi pasar.

Inti ajaran Adam Smith adalah agar masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Adam Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada keadaan full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai mencapai posisi stasioner (stationery

state). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam yang telah seluruhnya dimanfaatkan. Kalaupun ada pengangguran, hal ini bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat “aturan main” yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Pengusaha perlu mendapatkan keuntungan yang memadai (tidak hanya sekedar keuntungan minimum) agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru.

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua aspek yang sejalan dan saling berkaitan. Todaro (2006) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Netto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terdapat perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Daerah merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang kuat serta *steady growth* dalam skala nasional. Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya membentuk suatu pola kemitraan dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Suprihanto:2012). Pola kemitraan yang dimaksud

merupakan seluruh elemen masyarakat baik industri-industri maupun institusi terkait sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Perencanaan dan proses pembangunan ekonomi daerah disusun dan dijalankan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan juga *endogenous development* atau perusahaan yang terdapat di daerah tersebut. Sebagai perencana dan pembuat kebijakan pemerintah daerah berperan sebagai (Suprihanto, 2012).

- a. *Entrepreneur*, yaitu mampu berfikir sebagai “pebisnis”
- b. *Coordinator*, yaitu koordinator dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerahnya
- c. Fasilitator, yaitu mampu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal daerahnya
- d. *Stimulator*, yaitu memberi stimulasi untuk penciptaan dan pengembangan usaha

Pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan rakyat, disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Pemberlakuan otonomi daerah nyata-nyata memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensinya. Hal tersebut dikerenakan secara fundamental terdapat perbedaan antara pembangunan daerah dan nasional namun saling berkaitan (*interrelation*) baik dari segi kebijakan maupun kelembagaanya. Sehingga pola pembangunan setiap daerah akan berbeda dan memiliki keunggulan masing-masing. Namun dalam tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilisasi ekonomi, meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja sehingga perekonomian akan bergerak dan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lincoln Arsyad membedakan pengertian daerah (region) berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kedalam 3 kategori :

- 1) Daerah homogen, yakni daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam ruangan tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografis dan lain sebagainya.
- 2) Daerah nodal, yakni suatu daerah di anggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan.
- 3) Daerah administratif, yakni suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administratif tertentu, seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Pengertian daerah disini didasarkan pada pembagian administratif satu negara.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Menurut teori ekonomi Neo Klasik, ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Lincoln, 2004).

Dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 2004). Untuk itu diperlukan variabel determinan perekonomian yang disesuaikan setiap waktunya. Dalam mengukur tingkat perekonomian daerah secara umum, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan sebagai gambaran dari variabel ekonomi lainnya seperti konsumsi, investasi, serta

produktifitas daerah tersebut. Selain itu, PDRB juga sebagai evaluasi atas kinerja ekonomi periode sebelumnya serta untuk menentukan kebijakan dan peluang di masa depan

2.1.1 Teori Paradigma Baru dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Paradigma secara sederhana diartikan sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi lingkungan luar dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam proses pembangunan, perkembangan paradigma disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang fluktuatif dalam aspek ekonomi dan sosialnya. Dalam pengamatan sistem ekonomi, perubahan paradigma pembangunan dipicu oleh keadaan ekonomi serta institusi yang bekerja pada masa tersebut. Dalam proses perbaikan (*recovery*) pasca perang dunia kedua, Eropa melakukan perbaikan ekonomi dengan melakukan modernisasi pada proses produksinya. Sedangkan di Indonesia, pasca kemerdekaan, paradigma yang digunakan berbasis pada stabilitas ekonomi. Pada orde baru fokus pembangunan ditekankan pada pertumbuhan dan pemerataan. Sedangkan pada era reformasi ditekankan pada pembangunan kualitas manusia dan masyarakat yang seutuhnya. Hal tersebut menunjukkan penyesuaian paradigma ekonomi mengikuti perubahan waktu.

Dalam teori ekonomi terdapat 2 paradigma yang dikembangkan yaitu Paradigma Lama (*Old Paradigm Theory*) dan Paradigma Baru (*New Paradigm Theory*). Dr. Jhon Suprihanto, MIM dalam sebuah tulisannya menyimpulkan bagaimana perbedaan pembangunan ekonomi paradigma lama dan paradigma baru dalam sebuah tabel, yaitu:

Tabel 2.1 Paradigma Pembangunan Ekonomi

Komponen	Paradigma Lama (Old Paradigm)	Paradigma Baru (New Paradigm)
Ketenagakerjaan (<i>Employee</i>)	Banyak perusahaan menandakan banyaknya kesempatan kerja	Perusahaan menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan rasio sesuai dengan jumlah penduduk daerah tersebut
Basis/ dasar program pembangunan (<i>Development Base</i>)	Membangun sektor-sektor ekonomi	Menciptakan nstitusi/lembaga ekonomi baru
Aset Daerah (<i>Location Asset</i>)	Mengandalkan keunggulan Komparatif yang didasarkan pada aset fisik daerah (SDA)	Menciptakan keunggulan bersaing (<i>Competitive advantage</i>)
Sumber Daya Pengetahuan (<i>knowledge resources</i>)	Tenaga kerja yang sanggup bekerja keras	Pengetahuan sebagai penggerak ekonomi

Sumber: Suprihanto (2012)

Tabel 2.1 menjelaskan secara umum gambaran perbedaan antara paradigma ekonomi lama dan baru. Dalam paradigma baru, yang lebih ditekankan adalah penciptaan kualitas lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan keunggulan potensi Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Dalam pembangunan ekonomi, penting peran institusi yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi serta kegiatan sosial politik masyarakat. Dalam hal ini, setiap aspek saling mendukung, baik sosial, ekonomi dan politik.

Peningkatan aset diperoleh dari produksi yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain, sehingga suatu daerah dituntut untuk memiliki keunggulan masing-masing. Dengan sistem produksi yang baru tidak lagi berpusat pada kepemilikan Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam pada dasarnya membuat suatu daerah unggul dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki potensi alam yang sama. Namun, adanya batas produksi (*limit*) dari sumber daya alam, menjadi suatu kelemahan jika daerah hanya bertumpu

pada faktor tersebut. Maka, sistem keunggulan pada paradigma baru menggunakan *Competitive advantage*, dimana daerah memiliki keunggulan bersaing dengan daerah lain dalam pasar nasional maupun global. Metode pengukuran *Competitive Advantage* dapat dilakukan dengan membandingkan produktifitas, serta daya saing produk yang dihasilkan daerah tersebut dengan daerah disekitarnya

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Wagner (Guritno, 1999), jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organisasi mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya

Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno (1999:78), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap PDB semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap PDB akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat pada tahap lanjut pembangunan ekonomi terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave melandasi pendapatnya berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara (Dumairy,1997:163).

Sedangkan menurut teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Adolph Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi

pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997:162). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menentukan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave dalam (Sukirno, 2000:45) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Sukirno, 2000:47).

2.1.4 Teori Lokasi dan *Mutiplier effect*

Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tentang tata ruang serta elemen-elemen penyusunnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan yang berkaitan dengannya. Teori lokasi dapat juga disebut sebagai ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap berbagai macam kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya baik ekonomi maupun sosial yang ada di suatu wilayah (Tarigan, 2005). Adanya lokasi berkaitan dengan adanya ruang, dan ruang yang dimaksud ialah tempat untuk berkegiatan/aktifitas manusia. Aktifitas manusia yang ada dalam suatu ruang salah satunya berupa kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wilayah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan maka akan mengalami perkembangan. Perkembangan yang ada di suatu wilayah tidak akan lepas dari adanya konsep pembangunan. Menurut Boudeville (1966 dalam Chotimah 2012) pembangunan merupakan peristiwa berkembangnya pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Boudeville memiliki makna bahwa suatu wilayah yang memiliki populasi industri/usaha yang kompleks, akan dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Populasi industri disini dapat juga dimaksud dengan kegiatan usaha yang mempunyai pengaruh yang besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap kegiatan lainnya. Adanya pembangunan pada suatu lokasi akan berdampak pada sisi ekonomi dengan membentuk pusat pertumbuhan baru dan memperluas jangkauan aktifitas industri usaha yang terletak di area perkotaan dan mempengaruhi zona sekitarnya.

Menurut Tarigan (2005) pusat pertumbuhan dapat diartikan dalam dua

cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional berarti bahwa pada tempat tersebut merupakan pusat dari aktifitas atau lokasi konsentrasi dari usaha maupun industri yang ada dengan memberikan efek pertumbuhan dan perkembangan baik itu ke dalam maupun ke luar dari lokasi industri tersebut. Sedangkan secara geografis maka pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki daya tarik sehingga mampu menarik berbagai macam usaha untuk berlokasi di situ dan masyarakat akan bermukim di tempat tersebut. Suatu lokasi dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, serta bersifat mendorong daerah belakangnya.

Adanya hubungan internal diartikan sebagai banyaknya jenis kegiatan usaha yang terbangun serta saling berkaitan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Keterkaitan antar sektor tersebut akan menciptakan pertumbuhan wilayah yang teratur serta tidak mengalami ketimpangan. Efek pengganda muncul karena adanya keterkaitan antar sektor tersebut sehingga timbul perputaran kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Adanya efek pengganda akan mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2005: 129). Adanya konsentrasi geografis dicirikan dengan terpusatnya fasilitas-fasilitas yang ada sehingga mampu menarik orang untuk berkunjung dan membuat daya tarik terhadap wilayah tersebut. Orang yang datang ke wilayah akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Adapun pada sifat pusat pertumbuhan yang mendorong daerah belakangnya diartikan dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.

2.1.5 Teori Modernisasi Perubahan Sosial Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi (Abdulsyani, 1994). Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat

berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, 19 prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya (Soekanto, 2001). Berdasarkan definisi mengenai sosial dan ekonomi, dapat dijelaskan bahwa sosial ekonomi adalah suatu interaksi masyarakat yang terjadi, dan di dalamnya ada proses kegiatan ekonomi yaitu perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat (Firdaus, 2011).

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan (Jabrohim, 2004: 167). Sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia dan antara orang dengan kelompok masyarakat (Yulianti, 2003: 91).

Perubahan sosial, Djazifah (2012:5), adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi sistem sosial masyarakat termasuk di dalamnya adalah perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dampak sosial adalah suatu bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik karena kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal-hal lain di dalam masyarakat (Fardani, 2012:6). Dampak sosial bisa ditandai dengan empat indikator, yakni perubahan sistem sosial, nilai-nilai individu dan kolektif, perilaku hubungan sosial, gaya hidup masyarakat, dan struktur masyarakat.

Keberadaan seperti hal mempengaruhi gaya hidup seseorang, tentu saja termasuk dalam berperilaku dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli mengenai konsumsi dan gaya hidup. Konsumsi terhadap suatu barang menurut Weber merupakan gambaran hidup dari kelompok atau status tertentu (Kartono, 1992:137). Tan dalam

Koentjaraningrat (1991 : 35) mengatakan untuk melihat kedudukan sosial adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat itu dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial rendah, sedang dan tinggi (Tan dalam Koentjaraningrat, 1991 : 35).

- a. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Yaitu masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal. Untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal, mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain.
- b. Golongan masyarakat berpenghasilan sedang. Yaitu pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung
- c. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga sebagian dari pendapatannya itu dapat ditabungkan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Menurut Sztompka (2008), definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli terdapat penekanan pada jenis perubahan yang berbeda, namun sebagian besar mereka memandang penting perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antar unsur-unsur masyarakat. Ritzer menyatakan perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu, sedangkan Macionis (dalam Ranjabar, 2017), menyatakan perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku waktu tertentu. Penekanan yang dilakukan para ahli dalam mendefinisikan perubahan sosial dititikberatkan pada perubahan struktural, karena perubahan struktural lebih mengarah kepada perubahan sistem sebagai keseluruhan ketimbang perubahan dalam sistem sosial saja. Struktur sosial merupakan sejenis kerangka pembentukan masyarakat dan operasinya, jika strukturnya berubah maka semua unsur lain cenderung berubah pula.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, ada perubahan yang lambat adapula yang cepat perbedaan ini merupakan bentuk perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial ini antara lain :

a. Perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat umumnya disebut revolusi. Hal pokok dari revolusi adalah terdapatnya perubahan yang terjadi dengan cepat, disamping itu perubahan tersebut menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan manusia. Sedangkan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung lama, dan serangkaian perubahan kecil yang saling mengikuti dan sangat lambat, perubahan ini dinamakan evolusi. Perubahan secara lambat umumnya terjadi tanpa perencanaan terlebih dahulu, evolusi terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan-kepentingan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Rangkaian perubahan-perubahan itu tidak perlu sejalan dengan serangkaian peristiwa-peristiwa pada sejarah masyarakat yang bersangkutan.

b. Perubahan yang besar dan perubahan yang kecil

Perubahan sosial yang besar pada umumnya adalah perubahan yang membawa pengaruh besar pula bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi sangat besar dan signifikan, misalnya perubahan yang terjadi pada industrialisasi masyarakat yang masih agaris tentu memberikan pengaruh dan perubahan seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, klasifikasi masyarakat dan hal-hal lainnya. Sedangkan perubahan sosial kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa dampak langsung terhadap masyarakat, misalnya perubahan gaya berpakaian atau *fashion* tidak akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan tidak pula menimbulkan perubahan signifikan pada lembaga-lembaga masyarakat.

c. Perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi didalam masyarakat karena telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan, pihak-pihak ini disebut pula *agent of change* atau agen pembaharuan. *Agent of change* ini adalah seorang atau sekelompok orang yang memimpin masyarakat melakukan perubahan pada sistem sosial,

selain itu tentu telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang tidak direncanakan atau dikehendaki, dan terjadi diluar pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat, misalnya cuaca buruk yang menimpa suatu wilayah nelayan sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang mengakibatkan munculnya tindakan kriminal karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam memahami perubahan sosial dapat dikaitkan dengan sifat manusia dimana semua teori dipandang mengandung penggambaran mengenai sifat manusia (Lauer, 1993 dalam Ranjabar, 2017). Asumsi mengenai sifat manusia tersebut kemudian akan melandasi pemikiran mengenai perilaku manusia. Dengan mempelajari perilaku manusia maka dapat dilihat cerminan dari keadaan kehidupan mereka. Disisi lain, manusia akan bereaksi terhadap keadaan masyarakat yang berlaku berdasarkan pemikiran dan motif masing-masing. Mengingat perubahan sosial masyarakat di Negara berkembang pada umumnya mengikuti atau menjadikan masyarakat maju sebagai acuan, maka modernisasi merupakan teori yang dapat menggambarkan perubahan masyarakat terutama dalam menganalisis masyarakat di sekitar Bandara Belimbing Sari.

Modernisasi merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep mengenai definisi modernisasi telah ada sejak 1950 hingga 1960-an yang di defisinikan dengan tiga cara (Sztompka, 2008). Pertama, definisi historis dimana modernisasi dipandang sebagai pergerakan dengan tujuan mengikuti ciri-ciri masyarakat yang dijadikan model sebagai masyarakat maju dan modern. Pada definisi ini, beberapa teoritis seperti Eisentadt (1966) dan Moore (1963) (dalam Sztompka, 2008) menilai bahwa masyarakat yang dituju adalah pola kehidupan masyarakat Barat yang dipandang sebagai masyarakat maju dan makmur. Kedua, definisi relatif yang menyatakan bahwa modernisasi merupakan gerakan untuk menyamai standar yang dipandang modern baik oleh rakyat maupun penguasa. Ketiga, definisi analisis yang memiliki ciri lebih khusus yaitu menentukan ciri

masyarakat modern untuk ditanamkan kepada masyarakat yang lebih tradisional dimana terdapat enam bidang yang akan mengalami pergerakan ke arah kemajuan yaitu ekonomi, politik, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, dan stratifikasi (Smelser, 1973 dalam Sztompka, 2008).

Semua masyarakat pada dasarnya terlibat dalam arus modernisasi pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya namun dengan kecepatan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan pada tiap wilayah (Rosana, 2011). Arus dan arah modernisasi yang berbeda-beda bahkan pada mula teori modernisasi dipandang sebagai pembeda antara yang mana modern dan tradisional, hal yang dipandang tradisional harus menuju hal yang dianggap modern pada akhirnya (Sztompka, 2004). Krisham Kumar (1988 dalam Sztompka, 2008) memaparkan terdapat ciri dari modernitas yaitu individualisme, diferensiasi dalam bidang pekerjaan, rasionalitas, ekonomisme, dan perkembangan yang kemudian disebut sebagai proses globalisasi.

Pada aspek lain, modernisasi dipandang dalam hal kepribadian dari individu yang dianggap sebagai masyarakat modern. Inkeles dan Smith (1974 dalam Haferkamp dan Smelser, 1992) menggambarkan kepribadian masyarakat modern sebagai masyarakat yang lebih terbuka akan hal baru, manusia yang berpendidikan sehingga lebih menerima sesuatu dari segi nalar dan ilmu pengetahuan, dan tidak terikat pada tatanan yang bersifat tradisional. Masyarakat dengan modernisasi dapat dikatakan sebagai masyarakat yang siap menghadapi perkembangan yang akan datang dan mampu menyesuaikan diri pada perubahan.

Terkait dengan kesiapan masyarakat terhadap perubahan maka faktor internal yang mendorong masyarakat untuk lebih maju merupakan faktor psikologis yang menjadi aspek penting selain faktor diluar dari manusia. Dalam Martono (2014) dijelaskan bahwa David McClelland sebagai salah satu pengikut teori modernisasi memberikan konsep yang penting dalam membahas modernisasi yaitu mengenai motif atau *the need for achievement (n-Ach)* dimana dikatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat dapat dilihat dari besarnya motivasi untuk maju dan lebih berprestasi dari dalam masyarakat itu sendiri. Dorongan tersebut berasal dari diri sendiri dan bukan untuk mendapat pengakuan

orang lain atau hanya untuk mendapat keuntungan yang lebih besar melainkan sebagai kepuasan atau pencapaian diri karena telah menjadi lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka masyarakat Indonesia dinyatakan masih memiliki tingkat *n-Ach* yang rendah (Moeis, 2009). Hal ini terlihat dari nilai masyarakat Indonesia yang masih menghindari persaingan satu sama lain untuk menjadi lebih baik, memiliki rasa hormat dan ketergantungan yang tinggi pada figur atasan, kurangnya orientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan yang terlihat dari tingkat konsumsi yang sangat besar dan etos kerja yang rendah.

Pemaparan asumsi terkait dengan teori modernisasi tersebut secara garis besar menjelaskan mengenai wujud perubahan sosial budaya, arah perubahan sosial budaya, faktor perilaku dan sifat manusia modern yang mempengaruhi terjadinya proses perubahan sosial budaya, dan menggambarkan bagaimana seharusnya arah perubahan terjadi.

a. Teori Perubahan Ekonomi Masyarakat

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang di alami oleh negara maupun pada daerah sedang berkembang yang semula bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur ekonomi yang modern di dominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 2006). Menurut Kuznet dalam Jhingan (1992: 420), perubahan struktur ekonomi atau disebut juga tranformasi struktural sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) yang disebabkan dengan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian pada suatu daerah dalam jangka panjang akan mengalami perubahan strukturperekonomian yang semula mengandalkan sektor pertanian akan menuju sektor industri atau jasa.

Dalam perekonomian tradisional, Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tenaga kerja tersebut erat

kaitannya dengan basis perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return.

Dalam perekonomian industri, sektor yang berperan dalam perekonomian adalah sektor industri, perekonomian ini terletak pada daerah perkotaan. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja.

Menurut Chenery (dalam Sukirno, 2006:123), yaitu mengenai analisis teori Pattern of development yang memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan oleh Chenery (dalam Sukirno, 2006:123) tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.

Berdasarkan sisi tenaga kerja akan terjadi proses seperti halnya yang dikemukakan oleh Lewis (dalam Meier, 2000:119), yaitu bahwa akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan wisata. Penelitian terdahulu dijelaskan Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Herranz-Loncen (2008)	<i>Infrastructure and Economic Growth in Spanyol</i>	Bagaimana peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi spanyol dengan menggunakan data 1850-1935	Infrastruktur dengan skop lokal, yaitu transportasi kota, distribusi listrik, dan infrastruktur air	Multiple Regression	Infrastruktur dengan skop lokal, yaitu transportasi kota, distribusi listrik, dan infrastruktur air memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi spanyol. Ketersediaan listrik secara nyata tidak hanya diperlukan oleh pembangkit listrik untuk operasionalnya namun juga digunakan sebagai input dalam proses produksi,
2	Agenor dan Moreno-Dodson (2009)	<i>Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications</i>	Apakah infrastruktur publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Infrastruktur diantaranya gas, air, listrik, transportasi, komunikasi dan GDP	Ordinary Least Square (OLS)	infrastruktur diantaranya gas, air, listrik, transportasi, dan komunikasi memberikann kontribusi terhadap GDP antara 5-11 persen di berbagai Negara
3	Demorger (2008)	<i>Infrastructure development and economic Growth : An Explanation for regional disparities in china?</i>	Bagaimana keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi	Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi	ECM	Transportasi merupakan faktor kunci yang membedakan gap antara satu propinsi dengan propinsi lainnya dan peran telekomunikasi sangat penting dalam mengurangi berbagai kendala jarak dan ketertutupan (isolasi)

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
4	NguyenVan Truong danTetsuo Shimizu (2017)	<i>The effect of transportation on tourism promotion: Literature review on application of the Computable General Equilibrium (CGE) Model</i>	Bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan wisata	Faktor ekonomi, faktor transportasi dan pertumbuhan wisata	Computable General Equilibrium (CGE) Model	Ada hubungan signifikan antara faktor ekonomi dan transportasi Ada hubungan signifikan antara faktor transportasi dan pertumbuhan wisata
5	Canning dan Pedroni (2004)	<i>The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth.</i>	Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang	infrastruktur pertumbuhan ekonomi	OLS	efek dari tersedianya infrasktruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang
7	Erickson Phalit Kadjan (2017)	Persepsi Masyarakat Tentang Pembangunan Bandara Uyang Lahai Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Bagaimana Persepsi masyarakat tentang pembangunan Bandara Uyang Lahai di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur?	Persepsi masyarakat dan bandara	Kualitatif	<i>Persepsi</i> masyarakat Miau Baru tentang pembangunan Bandara Uyang Lahai cukup baik yang ditandai dengan pengaruh bandara dalam meningkatkan endapatan dan dampak positifnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat
8	Yuliana	Strategi Pengembangan Pelayanan Publik di Bandar Udara Internasional Banyuwangi	Bagaimana strategi untuk meningkatkan pelayanan publik bandara Soekoarno Hatta?	Kualitas pelayanan	Kualitatif	Empat strategi tersebut (SO, WO, ST, WT) digunakan untuk diterapkan dalam pengembangan strategi yang dapat disarankan pada manajemen Bandara Internasional Banyuwangi

2.3 Keunggulan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Bandara Internasional Banyuwangi yang mempunyai konsep *Green Airport*. Bandara Internasional Banyuwangi merupakan bandara pertama yang mengusung konsep *green airport*. *Green airport* merupakan konsep arsitektur yang mengadopsi dari konsep *green building*. Bangunan hijau (*Green Building*) adalah bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntukan. Praktik ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik dalam hal ekonomi, utilitas, durabilitas, dan kenyamanan.

Bangunan hijau (*Green Building*) dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan:

- a. Menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien;
- b. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan;
- c. Mengurangi limbah, polusi dan degradasi lingkungan.

Penelitian ini ditujukan untuk Bandara Internasional Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi, khususnya masyarakat Kecamatan Blimbingsari.

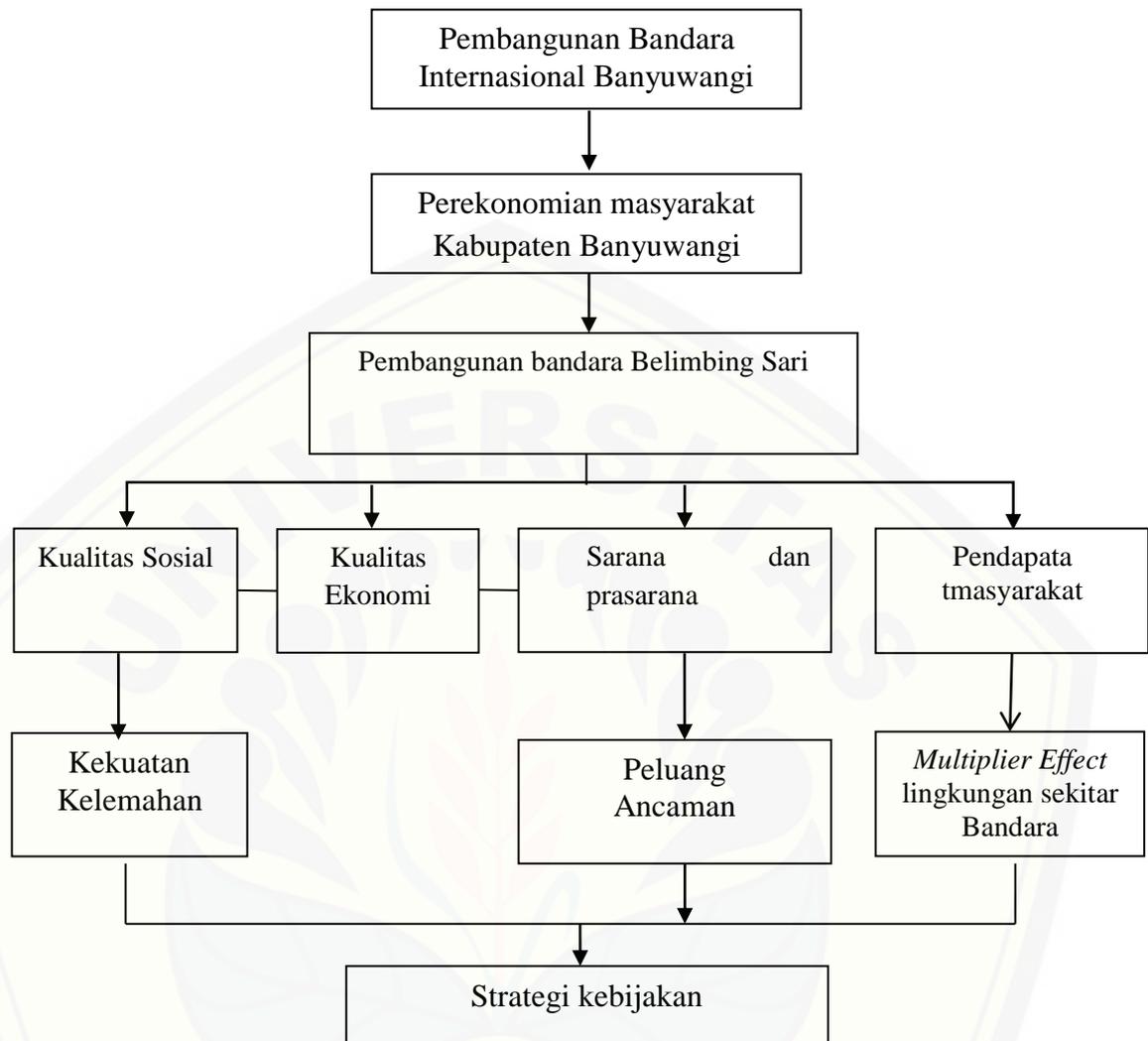
2.5 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mengurangi kesenjangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

Setiap wilayah yang dihuni oleh suatu masyarakat seharusnya mengalami perkembangan baik itu kaitannya dengan jumlah penduduk maupun kondisi ekonomi sosial masyarakatnya. Adanya wilayah yang selalu berkembang memberikan efek terhadap kebutuhan akan transportasi serta mobilitas manusia, barang maupun jasa. Kebutuhan mobilitas antar wilayah dapat diwujudkan dengan membangun sarana transportasi yang efisien yang mampu menjangkau seluruh wilayah, salah satunya ialah transportasi udara.

Kondisi transportasi udara yang ada di Indonesia berkembang begitu pesat ditandai semakin banyaknya jumlah armada pesawat serta jumlah penumpang pesawat udara. Namun di sisi lain terdapat keterbatasan fasilitas dalam hal infrastruktur penunjang transportasi udara, yaitu bandar udara (bandara). Sehingga Angkasa Pura selaku operator penerbangan ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola Bandara di Banyuwangi.

Pembangunan Bandara di Banyuwangi menimbulkan persepsi dari masyarakat. Persepsi diwujudkan dengan sikap kesiapan serta kesetujuan masyarakat terhadap adanya pembangunan bandara, serta gambaran arah dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat pasca bandara terbangun. Mengetahui orientasi usaha dimaksudkan agar nantinya pembuatan rencana pengembangan yang ada di sekitar bandara dapat selaras dengan keinginan dari masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini, menjelaskan variabel-variabel yang dipilih dan dijabarkan kedalam sub-sub variabel sehingga lebih mudah dalam pencarian datanya. Pada penelitian kuantitatif, dikaji untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2009:7). Penelitian kuantitatif menekankan pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk angka (*numeric*). Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data (Bungin, 2004 : 25)

Penelitian kuantitatif menekankan pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk angka (*numeric*). “Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data dengan teknik statistik, mengambil kesimpulan dengan generalisasi” (Farouk dkk, 2008 : 62).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Singarimbun, 2001: 98). Populasi penelitian adalah masyarakat dan *stake holder* di sekitar bandara Belimbing Sari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi masing-masing responden. Target penentuan sampel adalah responden dan *key person*. *Key person* ditentukan secara *purposive* (sengaja). (Kuncoro, 2003).

Key person dipilih melalui identifikasi pihak-pihak yang terlibat didalam pengelolaan kawasan bandara Informan adalah *stakeholder* yang terlibat didalam kelembagaan dan menguasai akses informasi terkait keluarga, diri sendiri,

lingkungan, serta pihak lain sehingga mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Apabila informasi yang diberikan *key person* masih kurang digunakan teknik *snowball* untuk memenuhi kelengkapan informasi. Sedangkan responden adalah pihak yang memiliki pandangan terhadap objek penelitian dan mampu menginformasikan persepsi tersebut. Responden pada penelitian ini terdiri dari masyarakat bandara, pelaku usaha, pengunjung dan pihak instansi terkait. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah salah satunya menentukan lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dimana peneliti akan memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi pada wilayah sekitar Bandara Internasional Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yaitu wilayah Kecamatan Rogojampi Kecamatan Banyuwangi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer (data asli) adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan penyebaran kuesioner, data ini yang nantinya akan dianalisis dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber utama, melainkan dari pihak-pihak lain ataupun dari data dokumentasi/arsip. Data ini meliputi data jumlah pelaku usaha berdasarkan usia, pendidikan, lama bekerja, golongan dan jabatan, dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3.5 Pengukuran Variabel

Penentuan skor untuk item-item pertanyaan terhadap masalah yang diteliti menggunakan Skala *Likert*. Alternatif penilaian dalam pengukuran item-item tersebut terdiri dari lima alternatif pilihan yang mempunyai gradasi sangat positif sampai dengan sangat negatif, misalnya sebagai berikut : Sangat setuju (skor 5),

Setuju (skor 4), Cukup Setuju (Skor 3), Tidak setuju (skor 2), Sangat Tidak Setuju (skor 1).

3.6 Analisis Data

3.6.1 Analisis *Multiplier Effect*

Manfaat ekonomi dapat diestimasi melalui *multiplier effect* (efek pengganda) (Putra *et al.*, 2017). *Multiplier effect* dalam penelitian ini adalah *multiplier income*. Data yang diperoleh melalui hasil kuisioner kepada masyarakat, unit usaha, pihak pengelola, dan tenaga kerja di lokasi bandara.

Pengukuran peningkatan kualitas ekonomi dan sosial wisata terdiri dari tiga dampak, yaitu dampak langsung, tidak langsung, dan dampak lanjutan. Pengukuran dampak ekonomi lokal melalui beberapa tipe efek pengganda yaitu: (Putra *et al.*, 2017).

- a. *Keynesian Income Multiplier* adalah perubahan unit pengeluaran memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat lokal. Secara matematis ditulis:

$$\text{Keynesian Income Multiplier} = \frac{D + N + U}{E}$$

- b. *Ratio Income Multiplier* adalah efek multiplier yang menggambarkan seberapa besar dampak terhadap perekonomian lokal. Multiplier ini telah memasukan dampak lanjutan dan dampak tidak langsung.

$$\text{Ratio Income Multiplier} = \frac{D + N}{D}$$

Multiplier effect memiliki kriteria-kriteria, sebagai berikut:

- a. Jika nilai koefisien multiplier tersebut kurang atau sama dengan nol ($= 0$), maka kawasan bandara belum mampu memberikan dampak ekonomi terhadap aktivitas pembangunannya.
- b. Jika nilai koefisien *multiplier* diantara nol dan satu ($0 < x < 1$), maka kawasan bandara memberikan nilai dampak ekonomi yang rendah.

- c. Jika nilai koefisien multiplier tersebut lebih atau sama dengan satu ($= 1$), maka kawasan bandara mampu memberikan dampak ekonomi terhadap aktivitas pembangunannya.

3.6.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor – faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada (Rangkuti, 2006).

Analisis SWOT adalah analisis yang membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 2006). Analisis ini pada prinsipnya strategi yang menghasilkan keserasian kuat antara kemampuan internal dan situasi eksternal. Analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran situasi strategis dari sebuah unit kerja ekonomi. Kekuatan unit kerja ekonomi merupakan segala sesuatu yang menjadikan unit kerja ekonomi memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dengan baik sehingga tujuan unit kerja ekonomi tercapai (Mardiasmo dan Makhfath, 2000). Menurut Rangkuti (2006) tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu:

1. Tahap pengumpulan data;
2. Tahap analisis
3. Tahap pengambilan keputusan.

Tahapan pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal yang diperoleh dari lingkungan di luar organisasi dan data internal yang diperoleh di dalam organisasi. Model yang dipakai pada tahap ini yaitu matrik faktor strategi eksternal (EFAS), matrik faktor strategi internal (IFAS) dan matrik

profil kompetitif. Selanjutnya untuk mengukur kondisi dari sektor unggulan diperlukan sistem pembobotan terhadap masing – masing aspek dengan cara :

1. Terlebih dahulu membuat prioritas dari yang pengaruhnya dianggap paling kuat ke yang paling lemah;
2. Menentukan %tase bobotnya dari masing-masing aspek yang antara lain:
 - a. Aspek kekuatan dan kelemahan sebagai aspek yang dilihat dari dalam (internal);
 - b. Aspek peluang dan ancaman yaitu aspek yang dilihat dari luar (eksternal)

Prosentase pembobotan, diberikan nilai bobot yang sama untuk analisis SWOT keadaan awal. Analisis SWOT yang dberikan bobot didasarkan hasil wawancara dengan pihak responden. Setelah masing – masing aspek dibobot, selanjutnya diadakan penilaian dengan menggunakan hasil identifikasi SWOT. Sistem pembobotan SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.1 Matrik SWOT

Aspek internal dan eksternal	Nilai	Rating	Bobot	Skor tertimbang
Faktor kunci sukses	Sangat kuat, kuat, lemah, paling lemah	4 sampai 1	%tase tersetujui	Rating x bobot
Total				Skor total

Sumber : Rangkuti (2000)

Langkah seterusnya dibentuk diagram analisi SWOT dengan cara pembobotan terhadap variabel – variabel terukur (aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) Posisi pada koordinat merupakan total skor tertimbang hasil dari :

Σ Skor tertimbang aspek kekuatan – Σ Skor tertimbang aspek kelemahan;

Σ Skor tertimbang aspek peluang – Σ Skor tertimbang aspek ancaman.

Strategi yang digunakan untuk matrik SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, berdasarkan hasil perhitungan dalam diagram analisis SWOT pada tabel berikut :

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
IFAS EFAS		
Peluang (O)	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (T)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Atasi kelemahan mencegah ancaman

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

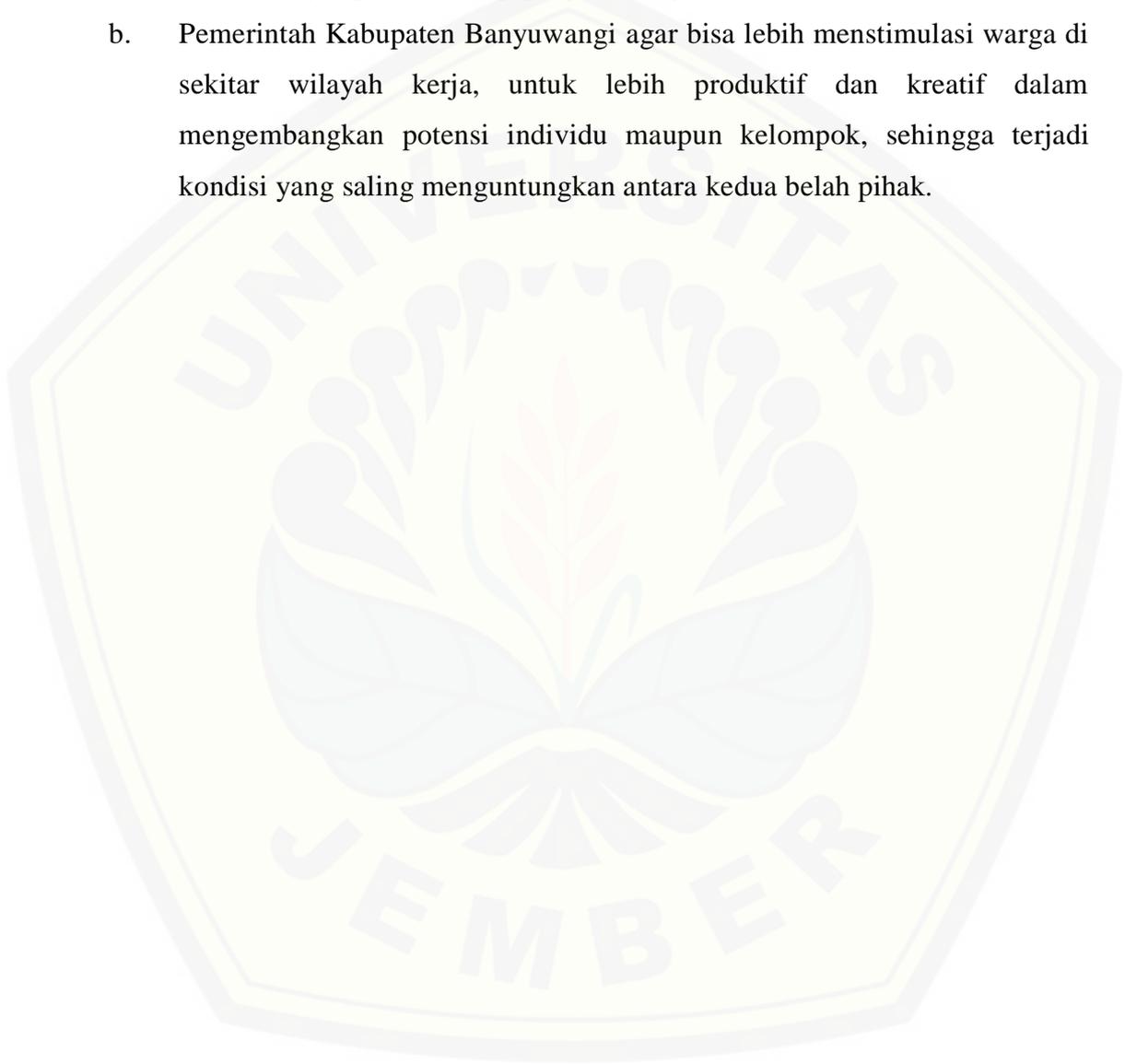
- a. Peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat di kabupaten banyuwangi melalui peran Bandara Internasional Banyuwangi dijelaskan dengan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil *multifier effect* menjelaskan bahwa ada peningkatan pendapatan dengan adanya Bandara Internasional Banyuwangi. Selain pemerintah Bandara Internasional Banyuwangi akan mendapatkan keuntungan yang besar masyarakat disekitar Bandara Internaisonal Banyuwangi.
- b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan peran bandara di Kabupaten Banyuwangi antara lain menetapkan dan Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa, mengembangkan sistem jaringan, mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah pertumbuhan kawasan dan mengembangkan sistem pelayanan utilitas dengan didasari empat strategi dalam peningkatan peran Bandara Internasional Banyuwangi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya sinergi khusus antara Pemerintah Pusat/Daerah, pelaku usaha dan masyarakat di sekitar Bandara Kabupaten Banyuwangi dalam menggerakkan perekonomian, dengan fokus sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berupaya seoptimal mungkin agar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan tepat waktu, guna mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara cepat dan efisien.

- 2) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) agar bisa mengarahkan masyarakat agar dapat merencanakan pengembangan wilayah (dimulai dari RT/RW), memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola anggaran secara mandiri, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ketat setiap program kerja.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar bisa lebih menstimulasi warga di sekitar wilayah kerja, untuk lebih produktif dan kreatif dalam mengembangkan potensi individu maupun kelompok, sehingga terjadi kondisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Brooks, Douglas H. Et.al. 2003. *Foreign Direct Investment in Developing Asia: Trends, Effects, and Likely Issues for the Forthcoming WTO Negotiations*. ERD Working Paper No. 38.
- Budiharsono, S. 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Cetakan Pertama, PT. Pradnya Paramita; Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Glasson, J., 1978, *An Introduction to Regional Planning; Concepts, Theory and Practice*, Second Edition, Hutchinson dan Co. (Publisher) Ltd;, London.
- Hartono, Budiantoro.2008. *Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, pebruari 2008.
- Jhingan M.L. 1993, *Ekanomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan M.L. 2002, *Ekanomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaldor, N, 1970, The Case for Regional Policies, *Scotitish Journal of Political Economy*, No. 17
- Krugman, Paul. 1991. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, buku ke-2; moneter. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomi Pembangunan - Teori, Masalah dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory in Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Nazara. 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia*. Jakarta: FEUI

- Putra, Adetiya Prananda, , Tantri Wijayanti, Jimmi Sandi Prasetyo. 2017. Analisis Dampak Berganda (*Multiplier Effect*) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativit. Vol.1 No.2 Juli*
- Ranjabar, Jacobus. 2017. *Perubahan Sosial ; Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Sadi. Analisis Perkembangan Pariwisata Berbasis Event di Kabupaten Banyuwangi Prosiding Seminar Nasional IPTEK Olahraga, 2019, ISSN 2622 -0156
- Sarwedi. (2002). *Investasi Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 4, No. 1, Mei 2002. Jurusan Ekonomi-Universitas Kristen Petra. Tersedia: <http://Puslit.Petra.ac.id/Journals/Accounting/>.
- Simanjuntak, 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FEUI.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama. Padang: Baduose Media
- Sukirno, Sadono.2006. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka
- Suparmoko, M., dan Irawan. 1988. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: BPFE
- Supriono, A. 2004. *Analisis Perkembangan Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Supriono, A., Aditya W., Ati., Djoko S. 2009. *Karakteristik Perkembangan Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur Antara Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Todaro M, P., 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 dan 2. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga